

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh Segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kenikmatan kelancaran serta rahmatnya yang tak ternilai sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Profil Data Gender dan Anak Tahun 2017 dengan baik. Dengan memperhatikan dan mempedomani Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak. Data gender dan anak menjadi elemen penting bagi terselenggaranya Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) yang dapat membantu para pengambil kebijakan untuk memberikan gambaran secara spesifik mengenai peran, situasi dan kondisi perempuan dan laki-laki di Kabupaten Bangka, sebagai bahan pertimbangan dalam rangka Penyelenggaraan PUG dan PUHA.

Penggunaan data gender dan anak sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program/ kegiatan yang dilakukan oleh OPD sebagai Komitmen Pemerintah Kabupaten Bangka dalam mewujudkan pembangunan yang responsive gender. Tersusunnya Profil ini merupakan wujud kerjasama yang baik antara Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangka, untuk itu dengan segala hormat dan kerendahan hati disampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kerjasamanya serta kepada semua pihak yang turut serta membantu baik secara langsung , maupun tidak langsung dalam penyusunan Profil ini.

Kami menyadari bahwa profil ini masih jauh dari sempurna dan dengan segala keterbatasan yang ada, maka kerjasama yang sinergis dan berkesinambungan sangat diperlukan demi sempurnanya penyusunan profil ini dan semoga dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat Kabupaten Bangka. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Dinas P2KBP3A
Kabupaten Bangka
Kepala,

SUKIRMAN, SIP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19591018 198003 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Landasan hukum yang menjamin Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG) dalam UUD 1945 Pasal 27. Segala warga Negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28C ayat 1 yang menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan umat manusia. Pasal 28 ayat (2) setiap orang berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Landasan hukum lain yang memastikan terciptanya keadilan dan kesetaraan Gender (KKG) adalah UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap perempuan, dan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional.

Pentingnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) diakui sebagai persoalan penting oleh Indonesia dan tercermin pada dokumen – dokumen Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1978, 1993, 1988, 1993 dan 1999. GBHN dan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) 1999-2004 menyebutkan secara khusus kesetaraan gender sebagai salah satu tujuan khusus pembangunan dan GBHN menambahkan pentingnya perbaikan status perempuan untuk mencapai kesetaraan gender. Selanjutnya strategi pembangunan nasional dan menjadi strategi lintas sektoral pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dan dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) jangka panjang yang didalamnya terdapat Rencana Aksi 2005-2009.

Secara global sudah ada konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) yang di Indonesia sudah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1984. CEDAW sebagai suatu komitmen global seharusnya menjadi payung pembentukan perundang-undangan di semua Negara dalam meniadakan diskriminasi terhadap perempuan.

Tonggak lain dalam upaya meniadakan diskriminasi terhadap perempuan adalah kesepakatan Beijing yang dikenal dengan Beijing Platform For Action (BPFA). Ada dua belas wilayah kritis yang harus mendapat perhatian Negara jika ingin menghapus diskriminasi terhadap perempuan menegakkan Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG).

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. PERMENDAGRI ini sebagai landasan operasional pelaksanaan pengarusutamaan gender pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Bangka.

Dalam Peraturan Bupati tersebut mencantumkan bahwa kesetaraan gender secara eksplisit telah terintegrasi dalam RAD-PUG yang dengan argumntasi bahwa kendala dalam penanganan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender selama ini adalah :

- a. Kurangnya komitmen pada OPD dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah
- b. Belum adanya persamaan persepsi, kesamaan tujuan, kesamaan rencana tindak (action plant) dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender
- c. Masih banyaknya peraturan perundangan-undangan yang masih bias gender dan kurang mendukung pemerintah dalam pengarusutamaan gender.

Dalam konteks ini, setiap satuan kerja (Satker) diwajibkan untuk mengintegrasikan kesetaraan gender dalam perencanaan, pelaksanaan dan motnitoring serta evaluasi berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-

masing sehingga PUG menjadi ruh dalam pembangunan di segala bidang. Untuk melihat hasil pembangunan yang berkesetaraan dan berkeadilan gender, maka perlu menganalisis terlebih dahulu melalui data kuantitatif dan kualitatif tentang kesenjangan gender di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) agar dapat dilakukan reformulasi kebijakan responsif gender melalui perencanaan pembangunan yang responsif gender. Pembangunan yang responsif gender adalah pembangunan yang mengintegrasikan secara riil tentang pengalaman, aspirasi, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Isu-isu strategis kesenjangan gender di Kab. Bangka masih memprihatinkan. Seputar permasalahan Hukum dan HAM masih tingginya kasus gugat cerai yang masuk ke Pengadilan Agama, meningkatnya jumlah perempuan korban kriminalitas, tingginya jumlah kasus KDRT. Bidang Pendidikan masih menunjukkan rendahnya angka partisipasi sekolah perempuan pada jenjang pendidikan menengah pertama dan atas, disamping itu juga terlihat tingginya angka putus sekolah di Kab. Bangka. Bidang Kesehatan menunjukkan rendahnya kesadaran Ibu untuk memberikan ASI pada Anak, rendahnya kesadaran orang tua untuk mengimunisasikan bayi mereka, lebih dari itu angka kematian ibu juga relatif masing tinggi. Di bidang Politik keterlibatan perempuan dalam parlemen masih butuh peningkatan dan pengawasan dalam menyongsong pemilu pada tahun 2019 terutama pemenuhan kuota perempuan, disamping itu keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan di tingkat eksekutif juga sangat rendah berdasarkan capaian kinerja atau kepangkatan. Bidang sosial menunjukkan masih banyaknya anak jalanan yang belum tertangani dengan baik, disamping juga minimnya sarana pendidikan khusus bagi para disabilitas juga menjadi masalah tersendiri. Bidang ketenagakerjaan masih meninggalkan catatan dimana sektor formal masih didominasi oleh laki-laki, meskipun pada angkatan kerja antar Negara perempuan lebih banyak dibanding laki-laki namun mayoritas perempuan masih bekerja di bidang informal baik sebagai pembantu maupun pekerja lepas.

Dari berbagai catatan tersebut terdapat beberapa sebab yang melatar belakangnya diantaranya adalah:

1. Belum dipahaminya konsep kesetaraan dan keadilan gender di kalangan para pengambil kebijakan dan pelaksana program.
2. Belum kuatnya kepedulian dan komitmen berbagai pihak dalam upaya PUG.
3. PUG belum menjadi prioritas dalam pembangunan daerah karena dalam perspektif jangka pendek kurang berperan secara langsung dalam peningkatan pendapatan daerah.

B. Kondisi Geografis

Sumber daya manusia Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka per 31 Juli 2017 berjumlah 47 orang yang terdiri dari 35 orang PNS dan 12 orang Pegawai Honorer.

Berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan, maka PNS pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka Berdasarkan Golongan Tahun 2017

Golongan	a	b	c	d	Jumlah (Orang)
I	-	-	-	-	0
II	1	2	1	1	5
III	5	8	3	8	24
IV	5	0	1	-	6
<i>Jumlah Total</i>					35

Tabel 1.2

**Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bangka
Berdasarkan Jabatan Tahun 2017**

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1	Struktural	21
2	Jabatan Fungsional	1
3	Tenaga Teknis Lainnya	-
4	Arsiparis	-
5	Staf Administrasi/Fungsional Umum	13
<i>JumlahTotal</i>		35

Tabel 1.3

**Jumlah Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Bangka
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2017**

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	S-3	-
2	S-2	3
3	S1/DIV	22
4	D III	1
5	D I	-
6	SLTA	9
7	SLTP	-
8	SD	-
<i>JumlahTotal</i>		35

Untuk Pegawai yang berasal dari tenaga kontrak / honorer berjumlah
9 (Sembilan) orang yakni :

- a. Petugas Administrasi Pemerintahan : 5 (satu) orang;
- b. Sopir : 2 (tiga) orang;
- c. Petugas Kebersihan : 1 (satu) orang;
- d. Penjaga malam : 2 (dua) orang;
- e. Staf Pembantu P2TP2A (dari Setda) : 2 (dua) orang.

Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bangka dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa aset tanah dan bangunan, inventaris/peralatan kantor, kendaraan dinas serta fasilitas perlengkapan lainnya, yakni :

1. Tanah

Tanah yang dimiliki seluas 1.704 M² yang merupakan tanah bangunan gedung terdiri dari :

- Tanah bangunan gedung kantor (eks. BKKBN) seluas 1.704 M², terletak di Jalan Pemuda No. 2 Sungailiat.

2. Bangunan

Bangunan gedung kantor terdiri dari satu unit dengan luas lantai 288 M², Musholla satu unit dengan luas 43,90 M², Gudang Obat satu unit dengan luas 57 M², Rumah Dinas satu unit dengan luas 81 M².

Disamping bangunan gedung kantor, sampai dengan tahun 2016 Dinas DP2KBP3A memiliki 5 (lima) unit Balai Penyuluhan Keluarga Berencana dengan luas masing 50 M², yaitu :

- f. Balai Penyuluhan KB Kecamatan Sungailiat;
- g. Balai Penyuluhan KB Kecamatan Pemali;
- h. Balai Penyuluhan KB Kecamatan Mendo Barat;
- i. Balai Penyuluhan KB Kecamatan Puding Besar;
- j. Balai Penyuluhan KB Kecamatan Riau Silip.

3. Inventaris/Peralatan Kantor

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair, peralatan komputer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan APBD Kabupaten Bangka maupun bantuan dari Pemerintah Pusat.

4. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang dimiliki dan mendukung operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Bangka per 31 Juli 2017 sebanyak 4 (empat) unit kendaraan roda empat yang terdiri dari :

- 1 (satu) unit minibus Toyota Avanza Veloz,
 - 1 (satu) unit Mobil Unit Penerangan (Mupen),
 - 1 (satu) unit Mobil Bus Pelayanan KB (Muyan),
 - 1 (satu) unit Mobil Bus Antar Jemput Akseptor,
 - 1 (satu) unit Mobil Unit Pelayanan Keliling (Molin)
- dan 14 (dua belas) unit Sepeda Motor.

C. TUJUAN PENULISAN

- a. Tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin, berupa data jumlah dan kondisi laki-laki dan perempuan.
- b. Tersedianya informasi gender, yang dapat dijadikan dasar - dalam perencanaan, pelaksana dan evaluasi kebijakan program yang ada.
- c. Menjadi pendorong bagi lembaga pemerintah dalam hal - penyusunan data yang lebih responsif gender, yaitu menyiapkan data-data yang dipilah antara laki-laki dan perempuan.

D. KEGUNAAN PROFIL GENDER

digunakan sebagai bahan acuan bagi pengambil kebijakan dan pihak-pihak terkait dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bangka.

E. SUMBER DATA DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Sumber data dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan buku Profil Gender Kabupaten Bangka Tahun 2017 ini adalah :

1. Data primer : data yang dikumpulkan dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan dan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Daerah , Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik , Pengadilan Negeri Sungailiat dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak P2TP2A.

2. Data sekunder : data/informasi yang diperoleh melalui wawancara pada sejumlah pejabat instansi kabupaten bangka untuk melengkapi kekurangan data primer dan untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, lengkap dan spesifik tentang data pilah menurut jenis kelamin yang tersedia pada tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender di Kabupaten Bangka.

F. METODE ANALISS DATA

Metode analisis data dalam penyusunan Profil Gender Kabupaten Bangka Tahun 2017 menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif berdasarkan aspek disparitas dan indek paritas gender di Kabupaten Bangka.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Konsep Gender

Gender menjadi isu penting dan istilah yang sering diperbincangkan dalam proses pembangunan manusia baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Gender telah memasuki perbendaharaan di setiap diskusi dan tulisan sekitar perubahan sosial dan pembangunan di dunia ketiga. Demikian juga di Indonesia, hampir semua uraian tentang program pengembangan masyarakat maupun pembangunan di kalangan organisasi non pemerintah diperbincangkan masalah gender. Namun dari pengamatan, masih banyak terjadi kesalahpahaman tentang apa yang dimaksud dengan konsep gender dan kaitannya dengan perjuangan perempuan untuk mendapatkan kesetaraan dan keadilan. Banyak orang yang mempunyai persepsi bahwa gender selalu berkaitan dengan perempuan, sehingga setiap kegiatan yang bersifat perjuangan menuju kesetaraan dan keadilan gender hanya dilakukan dan diikuti oleh perempuan tanpa harus melibatkan laki-laki.

Kesalahpahaman tentang konsep gender ini sebagai akibat dari belum dipahaminya secara utuh atau kurangnya penjelasan tentang konsep gender dalam memahami sistem ketidakadilan sosial dan hubungannya dengan ketidakadilan lainnya. Oleh karena itu untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata seks. Istilah gender dan sex seringkali digunakan secara bergantian meskipun pada dasarnya makna keduanya berbeda.

B. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender

Sejak ditetapkan dan dikeluarkannya Inpres No 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) di Indonesia dan diberlakukannya instruksi presiden tersebut, implementasi PUG belum berjalan optimal, sehingga perlu diwujudkan melalui peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan perlindungan anak, penurunan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi serta penguatan kelembagaan dan jaringan PUG. Sehingga dalam implementasinya

InPres tersebut didukung dan dikawal oleh berbagai produk kebijakan pemerintah lainnya yang bersifat lebih detail dan teknis dalam rangka pencapaian yang maksimal.

Lebih lanjut pemerintah Indonesia juga mengatur pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah yang diatur dalam Permendagri RI Nomor 67 Tahun 2011. PUG dalam peraturan tersebut pada intinya dimaksudkan dalam beberapa gagasan dan kepentingan sebagai berikut:

1. PUG dimaksudkan sebagai strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender antara laki-laki dan perempuan, baik dalam kesetaraan gender, keadilan gender, analisis gender, perencanaan responsif gender, bahkan anggaran responsif gender. Dalam strategi dan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mempromosikan dan mendorong optimalisasi dan keseimbangan partisipasi kaum perempuan Dalam segala bentuk level kebijakan.
2. PUG secara keseluruhan diinstruksikan kepada pemerintah, pemerintah daerah, OPD, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan hingga pemerintah desa, untuk melakukan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dengan mempertimbangkan permasalahan kebutuhan aspirasi perempuan pada pembangunan dalam kebijakan, program dan kegiatan.
3. Strategi tersebut dapat dilaksanakan melalui sebuah proses yang memasukkan analisa gender ke dalam program kerja, pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan kepentingan perempuan dan laki-laki ke dalam proses pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJM, renstra SKPD, dll.

C. Model Analisis Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender

- a. Model PROBA (problem based approach) Model analisa gender ini adalah suatu teknik untuk menganalisa kesenjangan gender (gender gap). Dengan demikian analisa gender dimulai dengan melihat kesenjangan gender yang selanjutnya dibentuk GFP (gender focal point) dan POKJA PUG dalam tataran pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan pengarusutamaan gender. Model analisa ini juga dilengkapi dengan indikator-indikator seperti input, output, outcome dan proses.
- b. Model analisa GAP (gender analysis pathway) Model atau kerangka analisa gender GAP merupakan suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu perencanaan dan pelaksanaan dari kegiatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan kebijakan/program/proyek dari kegiatan pembangunan.

BAB III

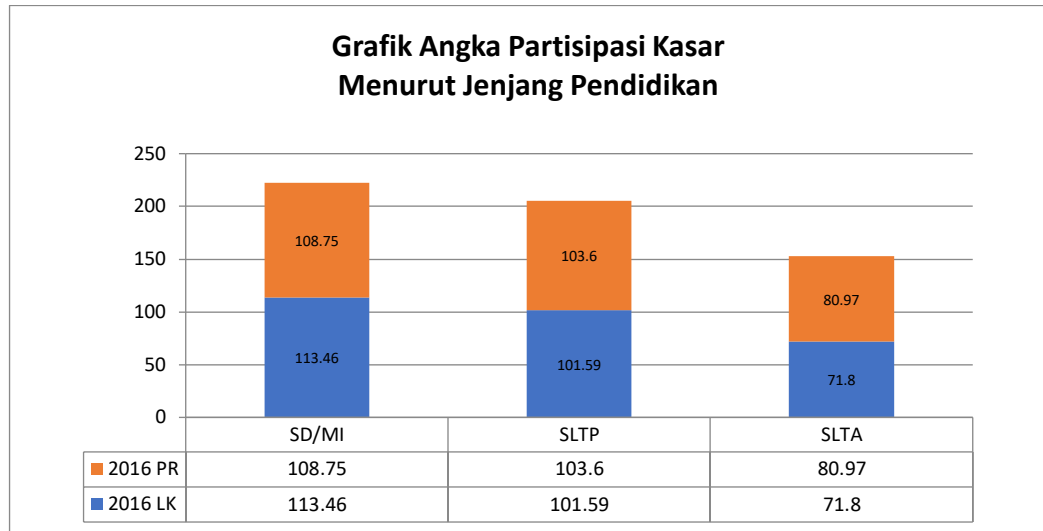
PENDIDIKAN

Bidang pendidikan merupakan salah satu sektor yang memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan Nasional karena melalui bidang pendidikan akan mampu meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Pendidikan juga akan mendorong terbentuknya karakter yang positif dalam diri seseorang dalam berkarya dan bermasyarakat. Pendidikan juga secara tidak langsung akan mempengaruhi relasi gender yang lebih harmonis. Rencana aksi nasional penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam bidang pendidikan bertujuan untuk dapat mendukung terciptanya sistem pendidikan yang membentuk rasa saling menghargai dan menghormati serta mendorong rasa kerja sama antara perempuan dan laki-laki serta menghapus budaya kekerasan melalui kebijakan demokratisasi di bidang pendidikan.

A. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan

Angka Partisipasi Kasar (APK), menunjukkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan (berapapun usianya) terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Adapun angka partisipasi kasar tingkat SD/MI laki-laki lebih tinggi yaitu 113,46 % sedangkan perempuan 108,75%, di tingkat SLTP perempuan lebih tinggi yaitu 103,6% sedangkan laki-laki 101,59%, sedangkan di tingkat SLTA partisipasi perempuan juga tinggi yaitu 80,97% sedangkan laki-laki hanya 71,8%. Ini dapat dilihat dari grafik dibawah ini.

Tabel 1.1

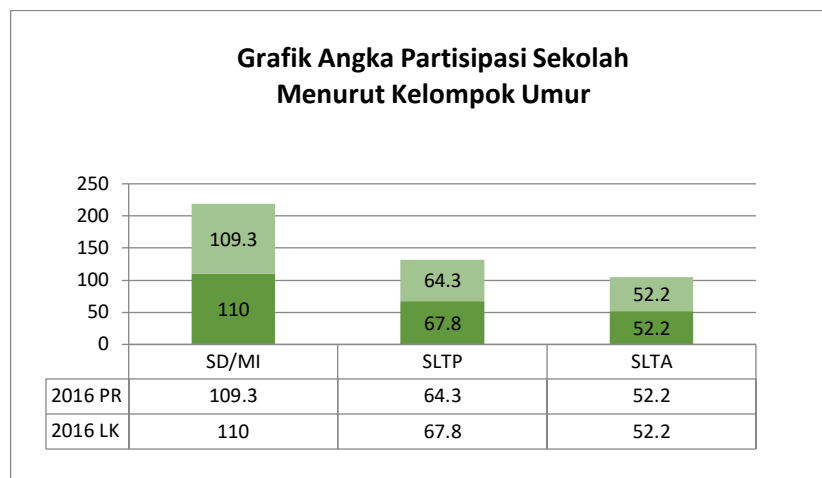


Sumber Dinas Pendidikan Kab. Bangka

a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok umur

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan, grafik dibawah ini menunjukkan bahwa di tingkat SD/Mi dan SLTP laki-laki lebih tinggi persentasinya yaitu 110 % tingkat SD/Mi dan 67,8% tingkat SLTP, di bandingkan dengan perempuan yaitu 109,3%, SD/Mi dan 64,3% tingkat SLTP sedangkan di tingkat SLTA laki-laki dan perempuan memiliki persentasi yang sama yaitu 52,2 %.

Tabel 1.2

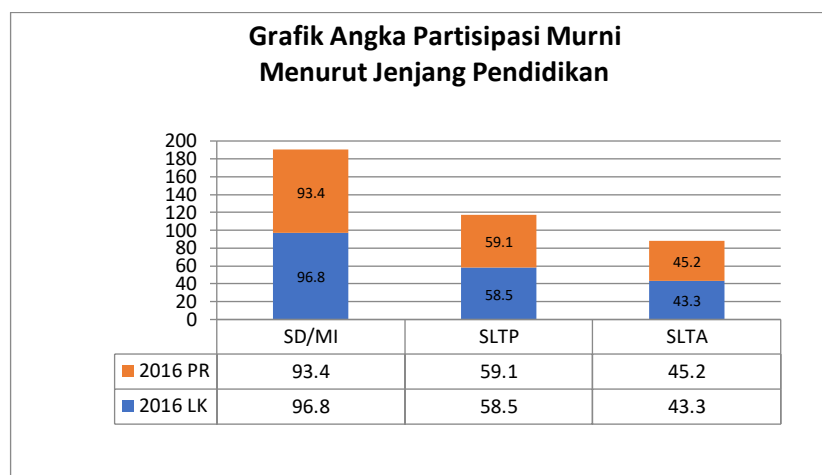


Sumber Dinas Pendidikan Kab. Bangka

b. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut jenjang pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Bila APK digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan di suatu jenjang pendidikan tertentu tanpa melihat berapa usianya, grafik dibawah ini menunjukkan tingkat SLTP dan SLTA perempuan persentasinya lebih tinggi.

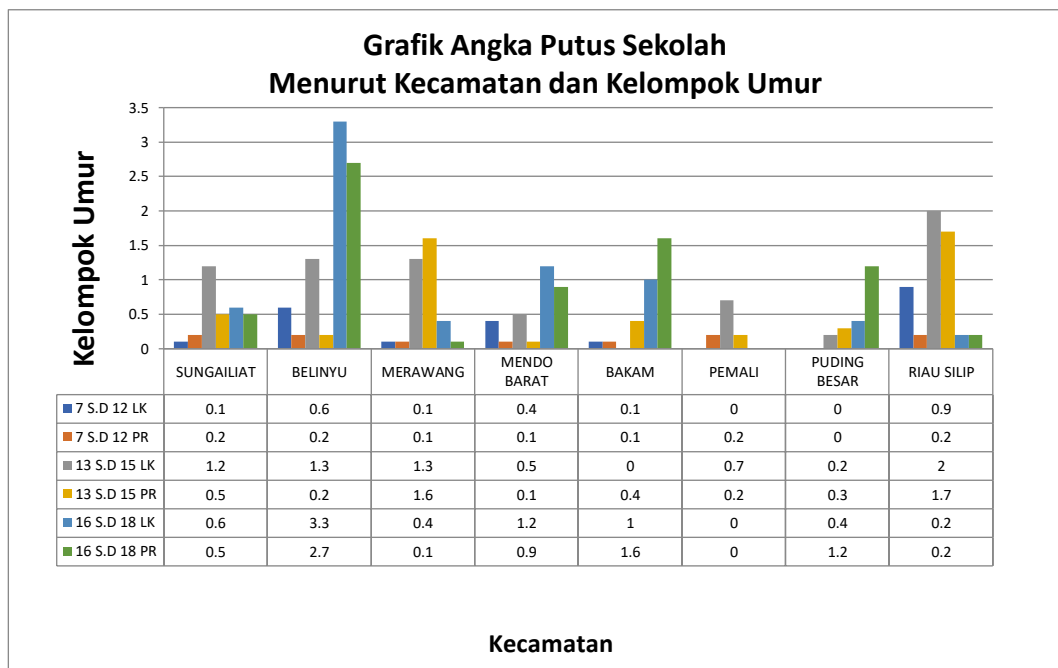
Tabel 1.3



c. Angka Putus Sekolah menurut jenjang pendidikan

Salah satu permasalahan laten dalam pendidikan yang masih terjadi dari tahun ke tahun di setiap wilayah, termasuk Kabupaten Bangka adalah masih adanya siswa yang putus sekolah, dengan adanya indikasi dari adanya siswa yang putus sekolah di beberapa kecamatan. Sebagaimana dapat dilihat dari gambaran tabel berikut ini:

Tabel 1.4



BAB IV

KESEHATAN

Isu kesehatan merupakan indikator penting dalam proses pembangunan manusia terutama pada negara berkembang seperti Indonesia. Tujuan utama pembangunan Index Pembangunan Manusia (IPM) adalah untuk mendukung terciptanya SDM yang sehat, cerdas, terampil dan ahli menuju keberhasilan pembangunan. Lebih dari itu kesehatan juga termasuk salah satu hak dasar masyarakat dalam mendapatkan kehidupan yang layak dan sejahtera. Faktor pembangunan kesehatan ini berimplikasi secara langsung kepada produktifitas perorangan dan kelompok, sehingga pembangunan dan berbagai upaya di bidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya, program di bidang kesehatan untuk laki-laki dan perempuan haruslah sama. Pada bab ini, selanjutnya akan disajikan serta dipaparkan berbagai data kondisi pembangunan bidang kesehatan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bangka. Data yang ditampilkan juga disertai dengan data terpilah gender, sehingga diketahui berbagai permasalahan gender baik kesetaraan maupun ketimpangan yang terjadi dalam akses, peran, kontrol maupun manfaat dalam bidang kesehatan.

a. Angka harapan hidup

Angka harapan hidup (AHH) merupakan rata-rata jumlah tahun (umur) yang diharapkan dilalui oleh seseorang sejak ia lahir, apabila ia hidup dalam lingkungan dengan kematian khusus yang terjadi pada saat itu. Angka harapan hidup sangat dipengaruhi oleh tingkat kematian bayi dan anak, karena kematian pada saat itu berarti hilangnya peluang untuk hidup yang lebih panjang. Makin rendahnya tingkat kematian bayi, makin rendah angka harapan hidup. Sebaliknya semakin tinggi tingkat kematian bayi, makin rendah angka harapan hidup.

Tabel 1.1
Angka Harapan Hidup
Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah Kelahiran Hidup	Penyebab Kematian Ibu Melahirkan
1	Sungailiat	0	1840	-
2	Pemali	1	589	Pneumonia
3	Bakam	0	349	-
4	Belinyu	0	946	-
5	Riau Silip	1	522	Eklamsi Pasca Salin
6	Merawang	1	640	DBD
7	Puding Besar	1	375	Preeklamsi Berat
8	Mendo Barat	1	934	Eklamsi Ante Partum

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka

b. Angka kematian ibu melahirkan

Berdasarkan data yang terdapat di dinas kesehatan Kabupaten Bangka pada tahun 2016 jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Bangka tercatat sebanyak 5 kasus kematian ibu saat melahirkan . Kasus kematian ibu tersebut terdapat di wilayah Kecamatan Pemali, Riau Silip, Merawang, Puding Besar dan Mendo Barat. Kondisi ini memerlukan adanya inovasi kebijakan dan perencanaan program yang komprehensif dan linear antar lembaga yang ada di wilayah pemerintah Kabupaten Bangka agar dapat menurunkan dan meminimalisir kasus kematian ibu baik dengan jalan kuratif maupun preventif.

Tabel 1.2
Angka Kematian Ibu Melahirkan
Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Ibu	Persentase%
1	Sungailiat	0	
2	Pemali	1	
3	Bakam	0	
4	Belinyu	0	
5	Riau Silip	1	
6	Merawang	1	
7	Puding Besar	1	
8	Mendo Barat	1	

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka

c. Penyebab kematian ibu melahirkan

Berdasarkan data yang terdapat di dinas kesehatan Kabupaten Bangka pada tahun 2016 jumlah kasus kematian ibu di Kabupaten Bangka tercatat sebanyak 5 kasus kematian ibu saat melahirkan . Kasus kematian ibu tersebut terdapat di wilayah Kecamatan Pemali disebabkan Pneumonia, Riau Silip disebabkan Eklampsia Pasca Salin, Merawang disebabkan DBD, Puding Besar disebabkan Preeklampsia Berat dan Mendo Barat disebabkan oleh Eklampsia Ante Partum.

Tabel 1.3
Penyebab Kematian Ibu Melahirkan
Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Kematian Ibu	Penyebab Kematian Ibu Melahirkan
1	Sungailiat	0	-
2	Pemali	1	Pneumonia
3	Bakam	0	-
4	Belinyu	0	-
5	Riau Silip	1	Eklampsia Pasca Salin
6	Merawang	1	DBD
7	Puding Besar	1	Preeklampsia Berat
8	Mendo Barat	1	Eklampsia Ante Partum

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka

d. Cakupan pertolongan persalinan

Target Kementerian Kesehatan untuk mencapai 90 persen persalinan bisa ditolong oleh tenaga medis pada tahun 2010(Depkes, 2010) merupakan salah satu alat ukur dan evaluasi dalam hal keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kesehatan kaum ibu, khususnya kesehatan menjelang dan selama kehamilan sampai melahirkan, perawatan masa nifas, dan turut menyehatkan balitanya melalui air susu ibu(ASI). Tingginya angka kematian bayi dan angka kematian ibu di Indonesia jelas dipengaruhi oleh faktor penolong persalinan oleh kaum tenaga medis.

Tabel 1.4
Cakupan Pertolongan Persalinan
Kabupaten Bangka
Tahun 2016

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	IBU HAMIL				IBU BERSALIN/NIFAS					
			JML	KUNJUNGAN K1		KUNJUNGAN K4		JML	PERSALINAN DITOLONG NAKES		MENDAPAT YANKES NIFAS	
				JML	%	JML	%		JML	%	JML	%
1.	SUNGAILIAT	SUNGAILIAT	938	875	93,3	846	90,2	895	816	91,2	774	86,5
2.		SINAR BARU	301	297	98,7	283	94,0	288	284	98,6	269	93,4
3.		KENANGA	891	820	92,0	710	79,7	851	740	87,0	681	80,0
4.	PEMALI	PEMALI	654	620	94,8	618	94,5	625	588	94,1	584	93,4
5.	BAKAM	BAKAM	356	393	110,4	320	89,9	341	348	102,1	352	103,2
6.	BELINYU	BELINYU	748	730	97,6	704	94,1	713	694	97,3	701	98,3
7.		GUNUNG MUDA	255	256	100,4	249	97,6	243	247	101,6	247	101,6
8.	RIAU SILIP	RIAU SILIP	577	551	95,5	539	93,4	550	521	94,7	515	93,6
9.	MERAWANG	BATURUSA	724	690	95,3	689	95,2	692	636	91,9	635	91,8
10.	PUDING BESAR	PUDING BESAR	382	398	104,2	390	102,1	365	375	102,7	369	101,1
11.	MENDO BARAT	PETALING	804	789	98,1	794	98,8	768	718	93,5	708	92,2
12.		PENAGAN	203	201	99,0	193	95,1	194	208	107,2	202	104,1
JUMLAH (KAB/KOTA)			6833	6620	96,9	6335	92,7	6525	6175	94,6	6037	92,5

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka

e. Keluarga berencana

Tingkat kesadaran keluarga untuk berpartisipasi ber KB sudah menunjukkan perkembangan yang positif. Meskipun masih diperlukan upaya-upaya untuk mengajak akseptor muda . Pertumbuhan penduduk erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan akhirnya berdampak pada aspek sosial budaya. Ketidak seimbangan antara perekonomian dan pertumbuhan penduduk akan memperlambat proses pembangunan daerah. Karena itu program Keluarga Berencana (KB) terus digiatkan, Kesertaan ber KB dapat di lihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1.5
Jumlah Peserta KB baru dan KB Aktif
Menurut Kecamatan dan Puskemas
Tahun 2016

No	Kecamatan	Puskemas	Jumlah PUS	Peserta KB Baru		Peserta KB Aktif	
				Jumlah	%	Jumlah	%
1	Sungailiat	Sungailiat	7910	706	8,9	5722	72,3
2		Sinar Baru	2344	647	27,6	1762	75,2
3		Kenanga	6257	741	11,8	5356	85,6
4	Pemali	Pemali	4951	668	13,5	3351	67,7
5	Bakam	Bakam	2826	336	11,9	2556	90,4
6	Belinyu	Belinyu	6172	535	8,7	5235	84,8
7		Gunung Muda	1926	378	19,6	1349	70,0
8	Riau Silip	Riau Silip	4346	525	12,1	3241	74,6
9	Baturusa	Baturusa	4893	787	16,1	3609	73,8
10	Puding Besar	Puding Besar	3122	619	19,8	2828	90,6
11	Petaling	Petaling	5923	676	11,4	4639	78,3
12		Penagan	1731	247	15,8	1206	69,7
Jumlah (Kab/Kota)			52401	6892	13,2	40854	78,0

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka

f. Penderita HIV/AIDS

Pengidap HIV AIDS adalah seseorang yang mengalami sindrom penurunan daya tahan tubuh (AIDS) dan hidup terlantar setelah terbukti tertular virus HIV dengan bukti rekomendasi dokter atau petugas laboratorium. Data tersedia untuk masalah sosial pengidap HIV/AIDS di kabupaten Bangka sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6
Jumlah kasus HIV, AIDS
Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur
Tahun 2016

No	Kelompok Umur	HIV			AIDS		
		LK	PR	LK+PR	LK	PR	LK+PR
1	<4 Tahun	0	0	0	0	0	0
2	5-14 Tahun	0	0	0	0	0	0
3	15-19 Tahun	0	0	0	0	0	0
4	20-24 Tahun	1	2	3	0	0	0
5	25-49 Tahun	19	10	29	3	1	4
6	>50 Tahun	1	0	1	1	0	1
Jumlah (Kab/Kota)		21	12	33	4	1	5

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka

g. Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada ibu hamil

Sistem kerja imunisasi adalah dengan merangsang pembentukan antibodi dalam tubuh seseorang terhadap organisme tertentu dengan tanpa menyebabkan seorang sakit terlebih dahulu. Zat yang digunakan dalam membentuk imunitas tubuh tersebut terbuat dari mikroorganisme ataupun bagian dari mikroorganisme penyebab infeksi yang telah di matikan atau di lemahkan. Proses ini tidak akan membuat penderita jatuh sakit karena mikroorganisme tidak dalam kondisi ganas. Proses pemasukan vaksin biasanya dimasukan kedalam tubuh dengan melalui suntikan. Selanjutnya sistem pertahanan tubuh akan bereaksi terhadap vaksin yang di masukan ke dalam tubuh tersebut, tabel dibawah ini menunjukkan di kecamatan sungailiat jumlah ibu hamil paling tinggi.

Tabel 1.7
Persentase Cakupan Imunisasi TT pada Ibu Hamil
Menurut Kecamatan dan Puskesmas
di Kabupaten Bangka Tahun 2016

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH IBU HAMIL	IMUNISASI TETANUS TOKSOID PADA IBU HAMIL											
				TT-1		TT-2		TT-3		TT-4		TT-5		TT2+	
				JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%
1.	SUNGAILIAT	SUNGAILIAT	938	1	0,1	14	1,5	81	8,6	179	19,1	575	61,3	849	90,5
2.		SINAR BARU	301	0	-	0	-	5	1,7	133	44,2	161	53,5	299	99,3
3.		KENANGA	891	2	0,2	41	4,6	187	21,0	348	39,1	238	26,7	814	91,4
4.	PEMALI	PEMALI	654	0	-	0	-	177	27,1	213	32,6	228	34,9	618	94,5
5.	BAKAM	BAKAM	356	0	-	67	18,8	77	21,6	92	25,8	86	24,2	322	90,4
6.	BELINYU	BELINYU	748	0	-	71	9,5	288	38,5	176	23,5	205	27,4	740	98,9
7.		GUNUNG MUDA	255	0	-	0	-	61	23,9	97	38,0	99	38,8	257	100,8
8.	RIAU SILIP	RIAU SILIP	577	0	-	0	-	143	24,8	168	29,1	156	27,0	467	80,9
9.	MERAWANG	BATURUSA	724	2	0,3	3	0,4	71	9,8	182	25,1	422	58,3	678	93,6
10.	PUDING BESAR	PUDING BESAR	382	0	-	9	2,4	43	11,3	115	30,1	237	62,0	404	105,8
11.	MENDO BARAT	PETALING	804	17	2,1	206	25,6	280	34,8	220	27,4	189	23,5	895	111,3
12.		PENAGAN	203	16	7,9	76	37,4	77	37,9	37	18,2	10	4,9	200	98,5
JUMLAH (KAB/KOTA)			6833	38	0,6	487	7,1	1490	21,8	1960	28,7	2606	38,1	6543	95,8

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka

h. Ibu hamil yang mendapat tablet zat besi (fe)

Tabel 1.8
Jumlah ibu hamil yang mendapatkan tablet FE1 dan FE3
Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Tahun 2016

No	Kecamatan	Puskemas	Jumlah Ibu Hamil	FE1 (30 Tablet)		FE3 (90 Tablet)	
				Jumlah	%	Jumlah	%
1	Sungailiat	Sungailiat	938	875	93,3	830	88,5
2		Sinar Baru	301	299	99,3	300	99,7
3		Kenanga	891	812	91,1	710	79,7
4	Pemali	Pemali	654	620	94,8	618	94,5
5	Bakam	Bakam	356	393	110,4	320	89,9
6	Belinyu	Belinyu	748	730	97,6	704	94,1
7		Gunung Muda	255	256	100,4	250	98,0
8	Riau Silip	Riau Silip	577	580	100,5	581	100,7
9	Baturusa	Baturusa	724	690	95,3	689	95,2
10	Puding Besar	Puding Besar	382	398	104,2	390	102,1
11	Petaling	Petaling	804	774	96,3	773	96,1
12		Penagan	203	205	101,0	193	95,1
Jumlah (Kab/Kota)			6833	6632	97,1	6358	93,05

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka

BAB V

KETENAGAKERJAAN

Kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia merupakan hak yang dijamin oleh negara, seperti tercantum dalam undang-undang dasar 1945 pasal 27 ayat 2 yang berbunyi bahwa “tiap warga negar berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak”. Untuk itu, pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya.

a. Partisipasi Angkatan Kerja

Analisis angkatan kerja dalam kaitannya dengan kondisi perekonomian merupakan hal yang menarik untuk dilakukan karena tingkat dan pola partisipasi angkatan kerja cenderung bergantung pada ketersediaan kesempatan kerja dan perbedaan pada tuntutan memperoleh pendapatan antar kelompok penduduk. Tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan besaran rasio antara jumlah angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. Adapun yang masuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja, tidak bekerja dan mencari pekerjaan. Yang masuk dalam katagori bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, dan melaksanakan kegiatan lainnya(Pensiun, cacat dan sebagainya)

Tabel

Pendidikan Pencari Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Total
Tidak Tamat SD	0	0	0
SD	0	0	0
SLTP	1	0	1
SLTA	93	42	135
Diploma I	0	0	0
Diploma II	0	0	0
Diploma III	23	27	50
Diploma IV, SI	47	62	109

S2	0	0	0
S3	0	0	0
Jumlah	164	131	295

Sumber : DINA KERPERINDAG Kab. Bangka Tahun 2017

Tabel 1.1
Jumlah Pencari Kerja dan pendaftar
Menurut Kecamatan
Di Kabupten Bangka Tahun 2017

NO	KECAMATAN	BULAN																			
		JAN		FEB		MAR		APRIL		MEI		JUN		JUL		AUGST		SEPT		OKT	
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR
1	MENDO BARAT	0	0	0	1	3	1	4	2	1	0	0	0	8	3	4	4	5	4	5	2
2	MERAWANG	0	0	0	1	2	1	1	1	0	0	0	0	7	3	4	0	0	2	0	6
3	SUNGAILIAT	0	0	8	5	6	5	3	1	2	1	1	4	28	21	13	9	3	6	8	12
4	PEMALI	0	0	0	4	1	0	0	4	1	0	2	1	5	6	6	5	1	1	2	7
5	RIAU SILIP	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	6	0	3	1	4	1	5	3
6	PUDING BESAR	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
7	BELINYU	0	0	0	5	0	0	0	1	1	0	0	2	5	2	4	4	1	2	6	4
8	BAKAM	0	0	1	0	1	0	2	0	1	1	0	0	2	1	0	1	0	0	2	2
	TOTAL	0	0	9	17	13	9	10	9	7	3	3	7	61	36	35	25	14	16	28	36

Sumber Dinsosnaker

BAB VI

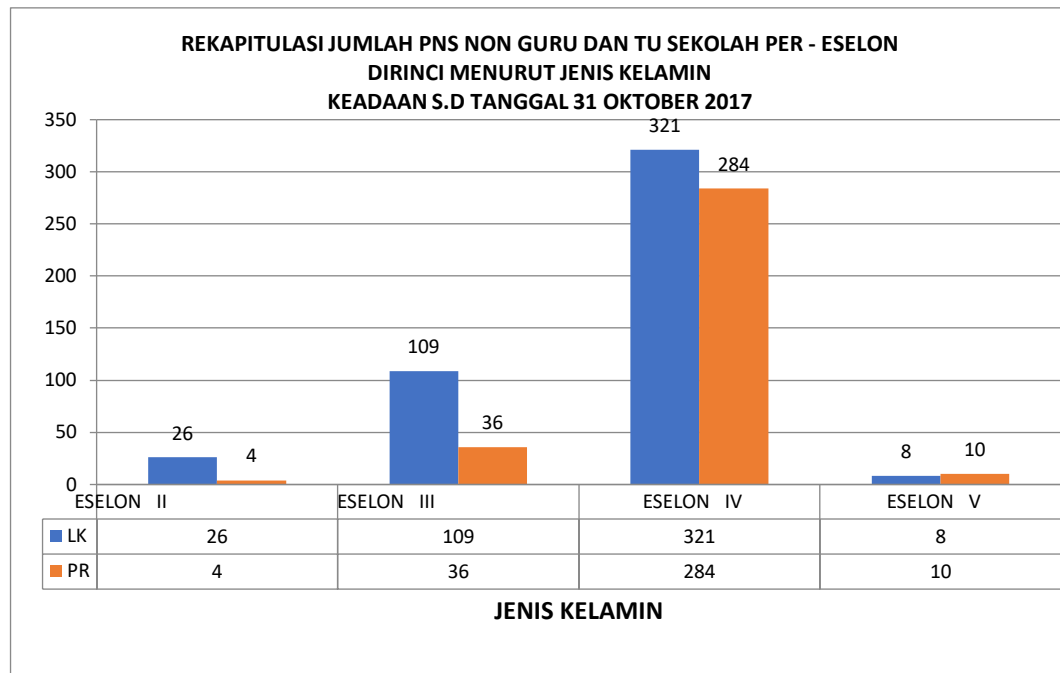
BIDANG KEPEGAWAIAN

PNS merupakan abdi negara, yang bertugas melayani masyarakat. Pada tabel 18 ditunjukkan jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

b. Jumlah PNS Non Guru dan TU Sekolah Per Eselon Menurut Jenis Kelamin

Untuk mendapatkan gambaran kondisi PNS Non Guru dan TU Sekolah di Kabupaten Bangka, di bawah ini merupakan data PNS Non Guru dan TU Sekolah per Eselon, mulai dari Eselon II, Eselon III, Eselon IV dan Eselon V di Kabupaten Bangka yang telah dipilah berdasarkan jenis kelamin, dilihat dari grafik dibawah ini masih terlihat kedudukan perempuan masih rendah di bandingkan dengan laki-laki.

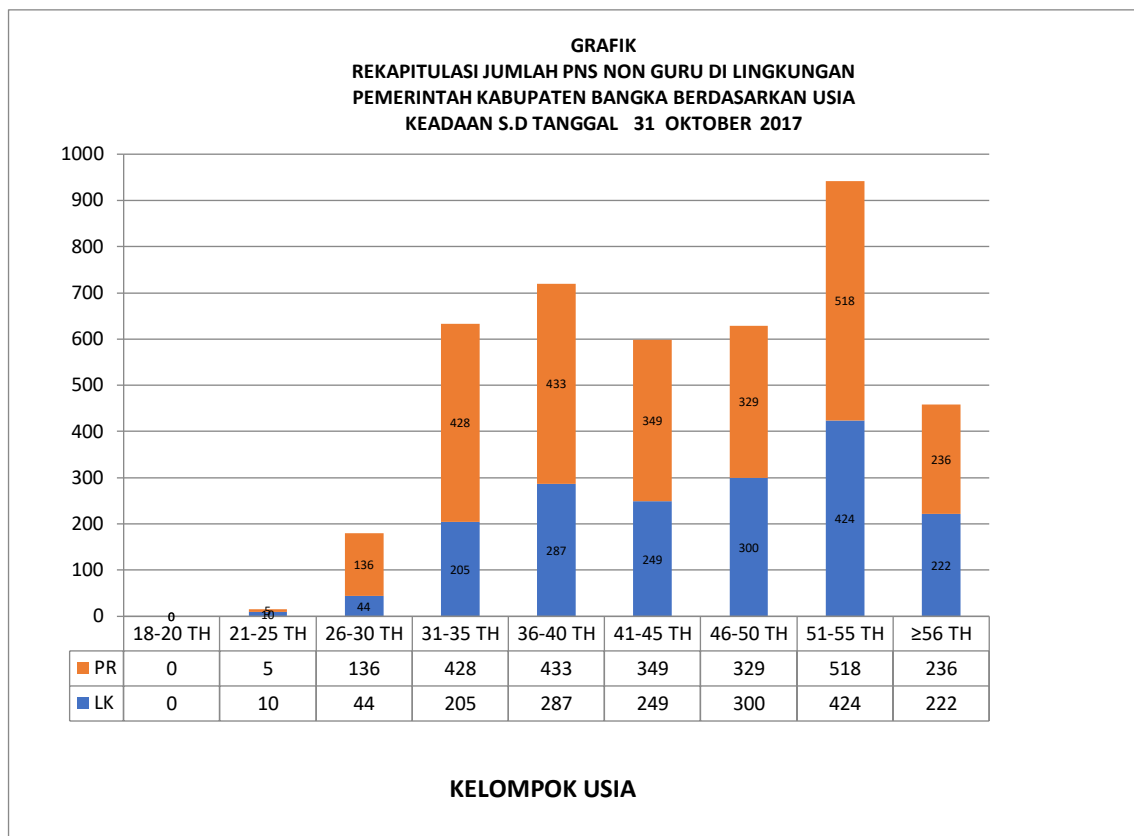
Tabel 1.1



Sumber BKD

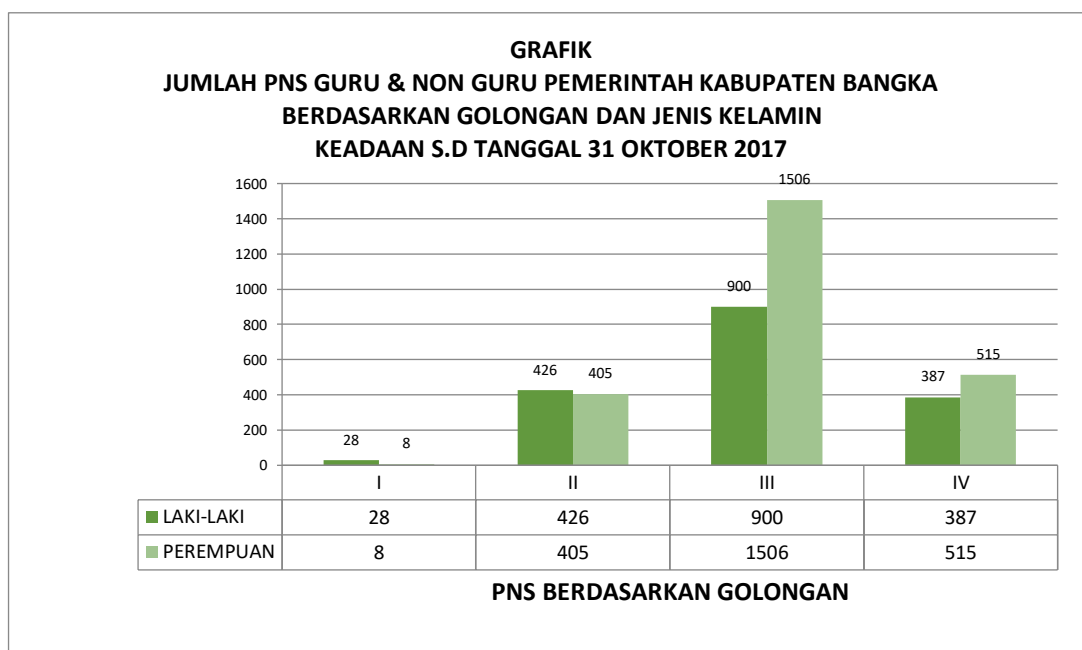
c. Jumlah PNS Non Guru Berdasarkan Usia

Tabel 1.2



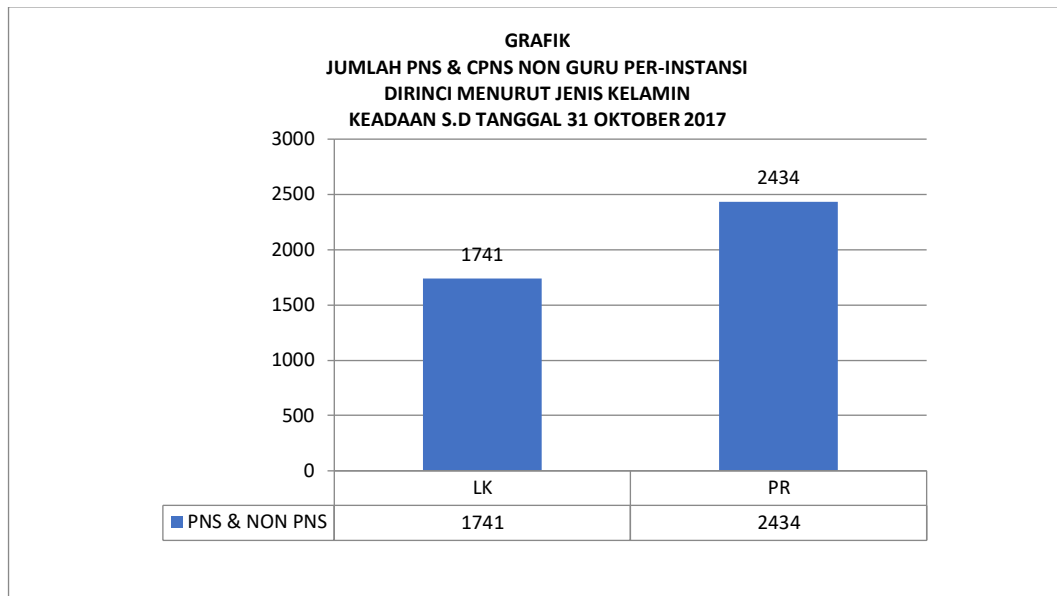
d. Jumlah PNS Guru & Non Guru Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Tabel 1.3



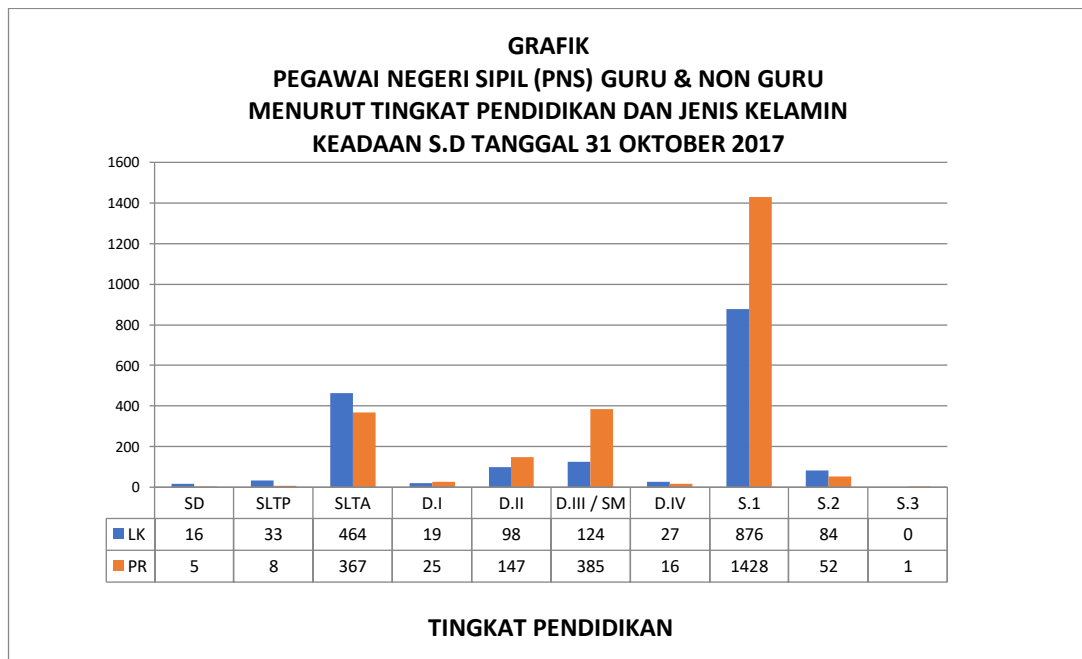
e. Jumlah PNS dan CPNS Non Guru Per-Instansi Menurut Jenis Kelamin

Tabel 1.4



f. Pegawai PNS Guru dan Non Guru Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 1.5



BAB VI

POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Partisipasi perempuan di legislatif merupakan gambaran dari penilaian masyarakat terhadap peran perempuan dalam kedudukan strategis. Mengingat pemilihan anggota Dewan langsung dari masyarakat. Pada Tabel partisipasi perempuan di legislatif merupakan gambaran dari penilaian masyarakat terhadap peran perempuan dalam kedudukan strategis. Mengingat pemilihan anggota Dewan langsung dari masyarakat. Data Profil Gender Kab. Bangka Tahun 2017 . Pada Tabel berikut ditunjukkan jumlah komposisi gender pengurus dan anggota fraksi di Kabupaten Bangka.

Tabel 1.1

No	Fraksi	Jumlah Anggota		JML
		LK	PR	
1	GOLKAR	41	26	67
2	GERINDRA	36	11	47
3	NASDEM	11	10	21
4	PKS	17	3	20
5	DPK PKPI	6	3	9
6	PPP	41	12	53
7	HANURA	32	12	44
8	PAN	58	12	70
TOTAL		242	89	331

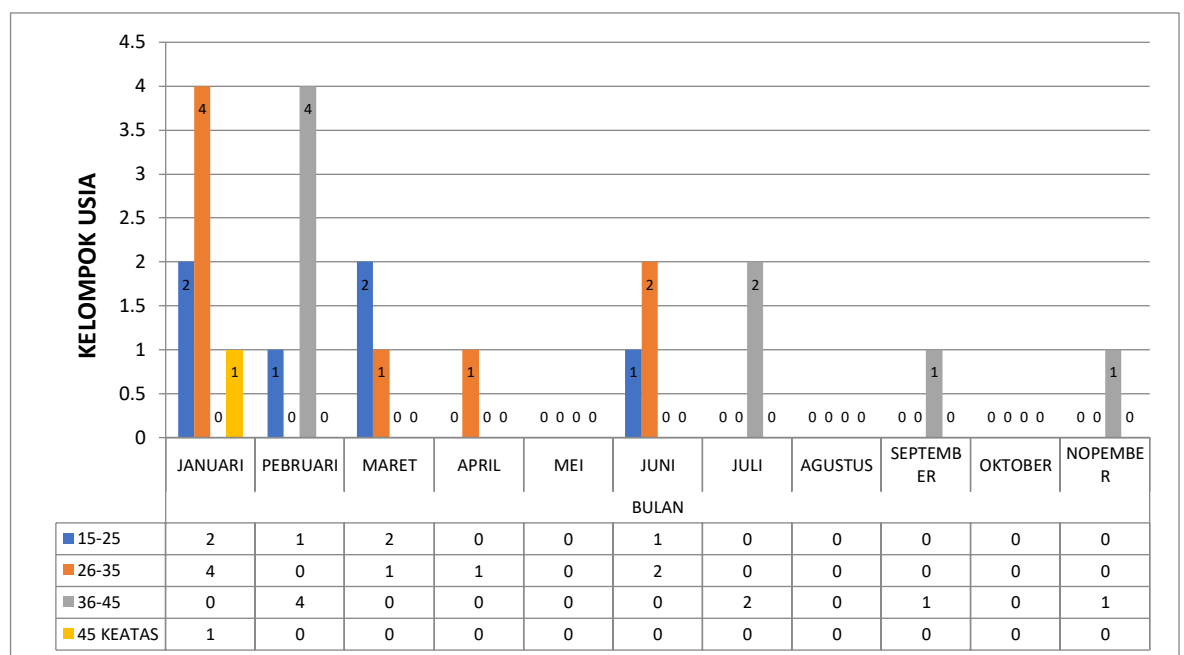
BAB VII

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

1. Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Salah satu jenis lembaga Penegak Hukum yang menangani secara terpadu korban kekerasan/perkosaan, pelecehan dan trafficking terhadap perempuan dan anak adalah Pelayan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) adalah lembaga yang terdiri dari beberapa lembaga lain yang secara terpadu berfungsi memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Data jumlah korban yang mendapatkan pelayanan di Pelayan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak P2TP2A di Kabupaten Bangka tahun 2017 menurut kelompok usia dapat dilihat grafik di bawah ini.

**Grafik Pelaku Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Berdasarkan Usia Kabupaten Bangka
Tahun 2017**



Perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disidangkan di pengadilan Negeri Sungailiat semester II Tahun 2017

KDRT	UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
9 (Sembilan) Kasus	9 (Sembilan) Kasus

Jumlah Hakim yang menangani perkara kekerasan yang ada di Pengadilan Negeri Sungailiat

Jumlah Seluruh Hakim	Jumlah Hakim yang menangani perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak
14 (empat belas) orang	14 (empat belas) orang

BAB IV

KESIMPULAN

1. KESIMPULAN

- d. Data-data yang tersedia dari berbagai sumber terutama dari yang-dipilah berdasarkan jenis kelamin.
- e. Potensi partisipasi perempuan diberbagai sektor baik sector-Pemerintah maupun publik menunjukkan masih ada beberapa bidang yang kurang responsif gender.
- f. Pada bidang legislatif perempuan belum mendapatkan porsi yang-seimbang, serta kedudukannya dalam komisi bukan pada posisi strategis atau sebagai pengambil keputusan.

2. REKOMENDASI

- a. Perlu sosialisasi tentang pentingnya data terpilah berdasarkan gender-(jenis kelamin) kesemua instansi, agar menjadi database dalam penyusunan kebijakan program Kabupaten Bangka.
- b. Perlu Pelatihan Penyusunan Program berbasis gender pada semua-instansi (SKPD), pada pengambil keputusan di Kabupaten Bangka termasuk anggota DPRD. Agar ada kesamaan pandang terhadap pembangunan yang responsif gender.
- c. Penyusunan Statistik Kabupaten Bangka, juga diikuti dengan-penyusunan Profil Gender yang dianggarkan, minimal setiap 2 tahun sekali.

PROFIL

DATA GENDER DAN ANAK KABUPATEN BANGKA

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BANGKA

DAFTAR ISI

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kondisi Geografis.....	
C. Tujuan Penulisan.....	7
D. Kegunaan Data Profil Gender.....	7
E. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Konsep Gender	11
B. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender	
C. Model Analisis Pemberdayaan Masyarakat Berperspektif Gender	
1. Model PROBA (problem based approach).....	
2. Model analisa GAP (gender analysis pathway).....	

BAB III PENDIDIKAN	23
A. Angka Partisipasi Kasar.....	24
B. Angka Partisipasi Sekolah.....	29
C. Angka Partisipasi Murni	33
D. Angka Putus Sekolah	
BAB IV KESEHATAN.....	41
A. Angka Harapan Hidup.....	41
B. Angka Kematian Ibu Melahirkan.....	43
C. Penyebab Kematian Ibu Melahirkan.....	44
D. Cakupan Pertolongan Persalinan.....	46
E. Kunjungan Ibu Hamil (K1/K4) ke Posyandu dan Puskesmas.....	52
F. Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada Ibu Hamil.....	54
G. Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Zat Besi (FE).....	56
H. Penderita HIV/AIDS	
I. Keluarga Berencana.....	
BAB V KETENAGAKERJAAN.....	59
A. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....	59
BAB VI POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN.....	115
A. Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	116
B. Perdagangan terhadap Perempuan dan Anak (Trafficking)	131
C. Perkara Yang Masuk Pengadilan Agama.....	132
D. Cerai Talak dan Gugat tahun 2012 dan 2013.....	134
E. Perkara Perceraian Menurut Faktor Penyebabnya	135
F. Perkara Yang Diputus Di Pengadilan Agama	137
G. Tindak Kejahatan.....	138
H. Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan	139
I. Surat Ijin Mengemudi Yang Diterbitkan.....	142
J. Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Jenis Pelanggaran.....	149
K. Sumberdaya Manusia (SDM) Bidang Hukum Di Kabupaten Malang.....	153
BAB VII POLITIK DAN PENGAMBILAN KEBIJAKAN	165
A. Partisipasi Perempuan di Bidang Politik	166
B. Jabatan Struktural di Kabupaten Malang Berdasarkan Golongan	169
C. TENAGA KERJA	172
BAB VIII EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN	193
BAB IX ISU-ISU STRATEGIS KABUPATEN MALANG	198
1. Putus sekolah	198
2. Kematian ibu.....	198
3. Kematian bayi	198
4. Kekerasan Terhadap Perempuan	199
5. Partisipasi Perempuan Dalam Politik	199
Daftar Pustaka	201
PENGHARGAAN DAN PRESTASI	203

